

DAFTAR ISI

1. Kemandegan CSR dan Kontribusinya
terhadap Perluasan Konflik Agraria
di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji
Dwi Wulan Pujiriyani, Oki Hajiansyah Wahab 101-115
2. Penerapan *Corporate Social Responsibility* pada Media Sosial
Studi Kasus Program *Corporate Social Responsibility*
"Klik Hati" PT Merck Indonesia
Faridha Rahmaningsih 116-129
3. Manajemen Konflik Berbasis Komunitas
Studi Kasus *Community Oriented Policing (COP)*
di Malioboro Yogyakarta
Muhammad Zuhdan 130-143
4. Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Kasus Lumpur Lapindo
Anis Farida 144-162
5. *Karst*: Ditambang atau Dilestarikan
Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen
di Kabupaten Pati Jawa Tengah
Suharko 163-179
6. Tanggung jawab Sosial Korporasi dan Hak-Hak Masyarakat
Hukum Adat
Afrizal 180-191
7. Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Pengaruh Wanita
Kepala Rumah Tangga
Agung Priyo Utomo, Rini Rahani 192-206

Karst: Ditambang atau Dilestarikan Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah

Suharko •

Abstract

The establishment of cement industry at regions with rich content of karst has increasingly grown in recent years. As a consequence, conflict of interest between cement company and local people groups has arisen. The article aims to mapping out a natural resource based-conflict in district of Pati, province of Jawa Tengah. The social conflict has taken place at the stage of pra-construction of cement plant in the south Pati. The cement company, supported by local government, has continuously tried to establish the plant. The local people groups have always rejected it. Through organizing indigenous people, building social networks, and undertaking various collective actions, the local people groups have refused any efforts for establishing the plant. While this social conflict has continued, so far there is no an adequate conflict resolution. However, the new government of Central Java resulted from the 2013 election provides an opportunity to end the conflict.

Keywords:

social conflict; karst; conflict resolution.

Abstrak

Pendirian pabrik-pabrik semen di daerah-daerah yang kaya dengan batu kapur berkembang pesat akhir-akhir ini. Artikel ini memetakan konflik berbasis sumber daya alam di kabupaten Pati, Jawa Tengah. Konflik sosial ini terjadi pada tahap pra konstruksi dari pembangunan pabrik semen di Pati bagian selatan. Pihak perusahaan yang didukung pemerintah daerah terus berupaya merealisasikan pembangunan pabrik semen. Melalui upaya-upaya pengorganisasian diri, pengembangan jejaring, dan tindakan-tindakan kolektif, kelompok-kelompok masyarakat setempat menentang setiap upaya mendirikan pabrik semen. Sementara konflik sosial masih terus terjadi, sejauh ini tidak ada tawaran resolusi konflik yang memadai. Namun demikian, pemerintahan Jawa Tengah yang baru hasil pemilihan gubernur 2013 memberikan peluang untuk penyelesaian konflik ini.

Kata Kunci:

konflik sosial; batu kapur; resolusi konflik.

Pendahuluan

Relasi yang bersifat *trade-off* antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam (SDA) masih terus berlangsung di Indone-

sia. Kinerja ekonomi dengan angka pertumbuhan ekonomi 6-6,5 persen per tahun, disamping tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Prasetyantoko et.al, 2012), juga tidak diikuti oleh perbaikan kualitas lingkungan dan

• Dosen Sosiologi Fisipol UGM Yogyakarta
e-mail: suharuko@yahoo.com

pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, kepentingan maksimalisasi pertumbuhan ekonomi lebih dominan daripada upaya perlindungan lingkungan hidup, meskipun wacana tentang pembangunan berkelanjutan terus berkembang dan diagendakan dalam praktik pembangunan di seluruh negara di dunia (Suharko, 2004). Dua kepentingan yang saling bertabrakan tersebut dengan mudah dapat ditemui di negara-negara Asia Tenggara, yang biasanya selalu muncul seiring dengan pembangunan bendungan (besar), penebangan hutan, polusi industri, pertambangan, turisme, dan aktivitas pembangunan lainnya (Hirsch and Warren, 1998).

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat tersebut, kebutuhan infrastruktur pembangunan, seperti jalan raya, gedung-gedung perkantoran, perumahan, dan lain-lain terus meningkat. Salah satu bahan penting untuk pembangunan infrastruktur tersebut adalah semen. Tidaklah berlebihan jika permintaan semen terus meningkat setiap tahun. Khusus untuk tahun 2013, permintaan semen tumbuh antara 10-12 persen. Para investor dan perusahaan-perusahaan semen pun terus mengincar daerah-daerah yang memiliki kandungan batu kapur yang besar untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan cara memperluas dan membangun pabrik semen baru. Pemerintah daerah biasanya menyambut gembira kedatangan mereka. Gubernur Jawa Tengah, mengkonfirmasi kecenderungan ini melalui pernyataannya: "Untuk meningkatkan produksi semen di tanah air, di Jateng akan berdiri tiga pabrik semen, yaitu di Kabupaten Rembang, Banyumas, dan Wonogiri yang saat ini masih dalam proses" (*Kompas*, 18 Februari 2013).

Salah satu area yang mengandung batuan kapur besar adalah pegunungan Kendeng Utara, yang disebut sebagai

kawasan *karst* Sukolilo yang membentang di bagian utara provinsi Jawa Tengah seluas 19.472 hektar. Kawasan tersebut meliputi wilayah kabupaten Pati (11.802 hektar), Grobogan (721 hektar) dan Blora (45,3 hektar). Kini area tersebut menjadi tujuan investasi dari perusahaan-perusahaan semen, seperti PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (sebelumnya bernama PT Semen Gresik Tbk), PT Sahabat Mulia Sakti (SMS), PT Vanda Prima Lestari, dan PT Solusi Mortar Pratama (*Kompas*, 2 Maret 2013).

Karena memiliki cadangan karst yang besar, kabupaten Pati, tepatnya Pati bagian selatan menjadi target perluasan dan pendirian pabrik semen baru. Meskipun persetujuan dari pemerintah daerah tidak sulit diperoleh, bukan berarti proses pembangunan pabrik semen bisa berjalan mudah. Hingga awal tahun 2013, belum ada satupun investor atau perusahaan yang telah berhasil melakukan pembangunan fisik pabrik semen di kabupaten Pati. Pada tahun 2009, PT Semen Gresik hampir saja mewujudkan pembangunan pabrik di kecamatan Sukolilo, sebelum kemudian mengurungkan rencananya karena penolakan keras dari masyarakat setempat yang didukung sejumlah LSM (NGOs).

Tahun 2010 PT Sahabat Mulai Sakti (SMS) memulai merencanakan pembangunan pabrik semen di kecamatan Tambakromo dan Kayen. Namun hingga akhir 2012, perusahaan tersebut masih berkutat pada upaya penyusunan studi Amdal (Analisis mengenai Dampak Lingkungan), yang menjadi prasyarat pokok diperolehnya ijin lingkungan dari pemerintah. Penyusunan studi Amdal yang dalam kondisi normal bisa diselesaikan selama 6 bulan, tampaknya harus membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Ini mengindikasikan bahwa proses studi berjalan tidak lancar, dan biasanya disebabkan oleh adanya penolakan yang cukup kuat dari masyarakat setempat.

Semua gejala tersebut mengindikasikan telah terjadi konflik sosial dalam proses awal pembangunan, yakni fase pra konstruksi pembangunan pabrik semen.

Tulisan ini bertujuan untuk memetakan konflik berbasis SDA (karst) yang terjadi di kabupaten Pati, dan menemukan celah kemungkinan resolusi konflik tersebut. Pada bagian awal dipaparkan konteks konflik yang meliputi latar geo-fisik, ekonomi dan sosial, yang kemudian diikuti oleh pemetaan pihak-pihak dan isu kepentingan dari konflik sosial ini. Dinamika konflik dan akibat-akibat yang ditimbulkan akan mengisi paparan selanjutnya, sebelum diakhiri dengan peluang resolusi konflik dalam catatan penutup.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tulisan ini menggunakan model pemetaan konflik (*conflict mapping*) Wehr (1979). Model analisis konflik Wehr menawarkan suatu kerangka pemetaan yang peka terhadap situasi konflik tertentu. Model ini meniscayakan adanya detail tentang konteks yang melatari terjadinya suatu konflik sosial. Selanjutnya, pihak-pihak yang berkonflik dipetakan berdasarkan isu kepentingan masing-masing. Peristiwa konflik yang berlangsung dari waktu ke waktu digambarkan melalui sajian dinamika konflik, yang mencakup peristiwa yang mengawali, akselerasi menuju puncak konflik, dan proses peredaan konflik. Upaya-upaya resolusi konflik yang pernah dilakukan pun ditunjukkan untuk memberi peluang penemuan resolusi konflik yang efektif. Dalam kerangka kerja seperti itu, model pemetaan konflik bisa berkontribusi pada upaya mengakhiri suatu konflik sosial, yang diikuti oleh strategi manajemen konflik dan rekomendasi kebijakan untuk resolusi konflik sosial.

Data yang digunakan bersumber dari laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh PSLH-UGM (2011). Penelitian yang dilakukan pada akhir tahun 2010 hingga

awal 2011 tersebut mengidentifikasi bentuk-bentuk respon dan penyikapan masyarakat setempat terhadap rencana pembangunan pabrik semen oleh PT SMS. Meskipun penelitian tersebut bukan secara khusus tentang konflik sosial, data yang diperoleh dapat dipergunakan untuk memetakan konflik sosial yang terjadi mengiringi rencana pembangunan tersebut. Data hasil penelitian tersebut dilengkapi dengan data sekunder yang dikumpulkan dari pemberitaan dan laporan media massa cetak dan *on-line* yang relatif gencar dalam 5 tahun terakhir terkait dengan rencana pembangunan pabrik semen di kawasan pegunungan Kendeng Utara.

Konteks Konflik

Wilayah kabupaten Pati terbagi dalam tiga bentang alam, yang dipengaruhi oleh struktur dan tata letak wilayah. Ketiga wilayah bentang alam tersebut adalah kawasan kaki gunung Muria, kawasan dataran rendah dan pesisir yang terletak di bagian tengah dan utara, dan kawasan pegunungan Kendeng Utara. Dua kawasan pegunungan tersebut menyediakan resapan dan cadangan air bagi wilayah Kabupaten Pati dan sekitarnya. Kawasan pegunungan Kendeng Utara, secara administratif terbagi ke dalam wilayah Kabupaten Pati di sisi utara, Kabupaten Grobogan di sisi selatan, dan Kabupaten Blora di sisi timur.

Pegunungan Kendeng Utara ditetapkan sebagai kawasan karst berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) nomor 0398 K/40/MEM/2005, tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo, yang menyatakan: "Kawasan batu gamping yang terletak di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakromo (di Kabupaten Pati), Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Ngaringan (di Kabupaten Grobogan), dan Kecamatan

Todanan (di Kabupaten Blora) Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai Kawasan Karst Sukolilo". Kawasan karst adalah wilayah yang di dalamnya terdapat singkapan batuan karbonat (batu gamping dan dolomit) yang telah dan sedang mengalami gejala karstifikasi akibat pelarutan oleh air (PSLH UGM, 2011: 73).

Kawasan karst Sukolilo tersebut memiliki fungsi sebagai penyimpan air pada musim kering dan mampu menyerap air pada musim penghujan. Menurut penelusuran Acintyacunyata Speleological Club (ASC) Yogyakarta, kawasan ini memiliki 321 mata air besar dan kecil, serta 117 mulut goa. Juga ditemukan 109 mata air di Kayen dan Tambakromo, serta 28 goa dan 5 ponor (cekungan tempat air permukaan masuk) (*Kompas*, 4 Mei 2012).

Penduduk setempat telah sejak lama bermukim di kawasan karst ini. Umumnya mereka memanfaatkan area pegunungan ini sebagai lahan pertanian dengan mengandalkan pengairan tadah hujan atau pertanian lahan kering. Jenis tanaman yang diusahakan oleh sebagian besar masyarakat adalah tanaman palawija, khususnya jagung. Tanaman holtikultura lainnya adalah pisang, mangga, jambu mete dan melinjo. Selain usaha pertanian, karena kekayaan flora di kawasan ini, warga masyarakat mengembangkan peternakan lebah. Usaha produktif lain yang diupayakan oleh masyarakat adalah penanaman pohon tanaman keras, seperti pohon jati, mahoni, dan sengon laut.

Sebagai kawasan resapan air, pegunungan Kendeng Utara memberikan kontribusi yang sangat besar kepada pasokan kebutuhan air untuk wilayah-wilayah yang ada di bawahnya yang berupa hamparan atau dataran rendah. Penduduk memanfaatkan air dari kawasan resapan tersebut untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian dan kebutuhan hidup lainnya. Luas areal persawahan yang

menggantungkan kelangsungan pengairannya dari pegunungan ini mencapai luas 15.873,9 hektar.

Warga masyarakat yang tinggal di sekitar pegunungan ini telah melakukan aktivitas penambangan batu kapur sebagai bahan baku bangunan rumah dan *phospat* yang dijual sebagai bahan baku pupuk. Kegiatan penambangan tersebut baik dalam skala kecil maupun besar sebenarnya bertentangan dengan Keputusan Menteri ESDM No. 0398 K/40/MEM/2005, yang menempatkan kawasan pegunungan Kendeng Utara sebagai kawasan lindung. Namun demikian, praktik penambangan tersebut terus berjalan, tanpa ada penindakan legal dari aparat yang berwenang. Di sejumlah desa di wilayah pegunungan ini banyak dijumpai lokasi-lokasi penambangan yang dilakukan oleh masyarakat pemilik lahan secara mandiri dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Bagi sejumlah warga, praktik penambangan ini telah menjadi mata pencaharian utama mereka, karena hasil dari lahan pertanian tidak bisa menopang kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, mereka merasa tidak ada pihak yang dirugikan karena mereka menambang di lahan milik sendiri dan bukan milik orang lain (PSLH UGM, 2011: 77-78).

Jika sejumlah warga masih terus mengusahakan penambangan batu kapur dalam skala kecil, maka PT SMS berencana menambangnya dalam skala besar. PT SMS akan membangun pabrik semen yang meliputi tapak pabrik dan penambangan bahan baku seluas 5.000 hektar. Dari luasan tersebut, 3.600 hektar berada di kecamatan Tambakromo dan Kayen (Pati). Khusus untuk tapak pabrik dirancang menggunakan lahan 80 hektar yang meliputi empat desa di kecamatan Tambakromo, yakni desa Mojomulyo, Tambakromo, Larangan, dan Karangawen. Kawasan ini diduga memiliki kandungan

kalsium oksida (CaO), bahan baku semen, lebih dari 50 persen (Kompas, 4 Mei 2012). Untuk bahan baku tanah liat akan diambil dari lahan seluas 1.400 hektar di 6 desa yang berada di kecamatan Grobogan dan Tawangharjo, kabupaten Grobogan (Kompas, 21 Mei 2011).

Pihak-pihak yang berkonflik

Pihak-pihak yang berhadapan dalam konflik berbasis SDA (batu kapur) ini adalah kelompok-kelompok masyarakat setempat dan jejaringnya yang menolak pabrik semen dan PT SMS yang didukung oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten). Masing-masing pihak yang berkonflik memiliki kepentingan yang bertentangan.

PT SMS adalah anak perusahaan PT Indocement Tunggal Prakasa di Jawa Barat, yang didirikan untuk mengelola pabrik semen di Pati. Ketersediaan dan cadangan batu kapur dan tanah liat yang melimpah di pegunungan Kendeng Utara telah mendorong perusahaan semen ini untuk mememanfaatkannya sebagai bahan baku pabrik semen. Untuk membangun pabrik semen tersebut, perusahaan ini menginvestasikan Rp 4 triliun – Rp 5 triliun (Kompas, 22 Mei 2011).

Bagi pemerintah daerah Kabupaten Pati, kehadiran pabrik semen diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi daerah terutama melalui penyerapan tenaga kerja baik yang langsung berhubungan dengan aktivitas pabrik maupun kegiatan-kegiatan ikutan dari hadirnya pabrik semen tersebut. Dengan cara tersebut pendapatan asli daerah (PAD) juga diharapkan akan meningkat signifikan. Tidaklah berlebihan jika pemda memberikan dukungan penuh terhadap perusahaan dan investor pabrik semen. Sejumlah peraturan dibuat untuk mendukung hal itu, terutama dalam peraturan tentang rencana tata ruang

wilayah (RTRW). Dalam peraturan tersebut, pegunungan Kendeng Utara dimasukkan dalam kawasan industri dan sekaligus kawasan lindung konservasi (Kompas, 2 Maret 2013). Kawasan pegunungan ini sebelumnya merupakan kawasan lindung-konservasi. Perubahan peraturan tersebut terkesan mengingkari Keputusan Menteri ESDM. Meskipun sulit untuk menemukan buktinya, perubahan peraturan ini mengindikasikan adanya pengaruh para pengusaha industri semen terhadap pemda.

Dari kalangan masyarakat setempat, pihak yang mendukung rencana pendirian pabrik semen ditemukan pada elit desa terutama sejumlah kepala desa (istilah setempat, 'petinggi'). Dukungan ini diduga berkaitan dengan peluang para kepala desa untuk mendapatkan 'pologoro', yakni imbal balik untuk desa dari proses jual-beli tanah. Kecenderungan sikap kepala desa ini biasanya diikuti oleh warga desa yang merasa akan mendapatkan manfaat langsung dari pendirian pabrik akan cenderung menerima rencana pabrik semen, seperti warga yang tanahnya dibeli dengan harga di atas pasaran untuk pengadaan lahan pabrik, dan warga yang berharap saudara atau kerabatnya bisa memiliki akses bekerja di pabrik.

Di sisi lain, penolakan dan penentangan terhadap rencana pendirian pabrik semen muncul dari kelompok masyarakat setempat yang secara sengaja mengembangkan bentuk pengorganisasian untuk menggalang aksi-aksi penolakan. Salah satu kelompok yang secara terbuka menolak pabrik semen adalah para pemuda di Dusun Ngerang, Kecamatan Tambakromo yang menamakan diri Gabungan Pemuda Ngerang (Gamurang). Mereka melakukan ritual adat dan memasang baliho dan spanduk dengan kalimat-kalimat yang menentang/menolak kehadiran pabrik semen di Tambakromo dan Kayen dan dipasang di pinggir jalan yang mudah dilihat oleh penduduk.

Di samping itu, berbagai kelompok masyarakat yang menolak tumbuh dari level akar rumput di sejumlah desa di Pati bagian selatan. Kelompok-kelompok tersebut antara lain Serikat Petani Pati, Konco Tani Kayen, dan bahkan kelompok ibu-ibu di Dusun Slening. Kelompok-kelompok akar rumput ini bersama-sama dengan komunitas adat setempat (masyarakat Samin) yang sering menyebut diri mereka 'Sedulur Sikep' menolak dengan tegas setiap bentuk intervensi industrial terhadap kelestarian SDA pegunungan Kendeng Utara. Komunitas adat Sedulur Sikep yang secara turun temurun berpegang pada pedoman hidup selaras dengan alam ini memiliki anggota yang solid dan tersebar di berbagai wilayah sekitar pegunungan Kendeng Utara, seperti Pati, Kudus, Blora, Rembang bahkan Bojonegoro. Mereka sebelumnya pernah terlibat dalam aksi penolakan terhadap rencana pendirian pabrik semen PT Semen Gresik di kecamatan Sukolilo, dan berhasil menggagalkan rencana tersebut. Bagi Sedulur Sikep, pelestarian pegunungan Kendeng Utara adalah sebuah keniscayaan untuk diperjuangkan, meski harus berhadapan dengan pihak-pihak dengan kuasa besar.

Kelompok-kelompok masyarakat yang menolak ini lebih jauh telah mengembangkan jaringan aksi secara luas untuk menggagalkan rencana pembangunan pabrik semen di kecamatan Tambakromo dan Kayen. Jaringan aksi itu mereka sebut Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK). Jaringan ini bersifat longgar dan cair, tidak memiliki struktur yang kaku, tapi mampu mengembangkan komunikasi secara intensif dari semua elemen yang berjejaring untuk suatu kepentingan bersama, penyelamatan pegunungan Kendeng Utara. Melalui bentuk-bentuk stiker, spanduk, baliho, film dokumenter, dan pembicaraan sehari-hari di

masyarakat, JMPPK terus menyatukan aksi bersama yakni menolak rencana pendirian pabrik semen yang menggunakan sumber daya alam (batuan kapur, tanah liat dan air) dari pegunungan Kendeng Utara dan sekitarnya.

Isu-isu Konflik

Konflik sosial ini muncul dan berkembang terkait dengan isu pemanfaatan sumberdaya alam batu kapur, air, dan tanah liat sebagai bahan baku semen, dan prakiraan dampak operasi pabrik semen terhadap kerusakan lingkungan dan SDA. Terhadap isu pemanfaatan batu kapur dan dampak lingkungan tersebut, masing-masing pihak yang terlibat memiliki posisi diametral yang sulit untuk dikompromikan.

Isu pemanfaatan batu kapur dan air

Bagi pihak PT SMS dan pemda, ketersediaan batu kapur dan air yang melimpah di pegunungan Kendeng Utara merupakan sumber daya alam potensial dan bernilai ekonomi tinggi, yang harus didayagunakan untuk kepentingan memajukan perekonomian daerah dan nasional. Cara yang paling menguntungkan adalah dengan mengubah bahan dasar tersebut menjadi semen. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian awal tulisan ini, permintaan semen terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia, dan bahkan untuk memenuhi permintaan ekspor ke negara-negara lain.

Melalui pendirian pabrik semen, warga masyarakat akan mendapatkan manfaat ekonomi. Mereka akan mendapatkan kesempatan kerja di pabrik tersebut, dan juga peluang-peluang ekonomi yang diharapkan muncul mengiringi proses pembangunan pabrik semen. PT SMS mengklaim bahwa pabrik semen itu akan membuka lapangan kerja bagi setidaknya 300 orang untuk kualifikasi tenaga

berkemampuan khusus, 500 orang tenaga kerja biasa, dan 500 orang tenaga kerja di luar pabrik (*Kompas*, 22 Mei 2011). Selain itu, dengan hadirnya pabrik semen diharapkan akan mendorong peningkatan perekonomian daerah, khususnya dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pati (PSLH UGM, 2011: 79). Singkatnya, pembangunan pabrik semen bisa menjadi kekuatan penggerak pembangunan ekonomi yang pada gilirannya akan membawa kepada kesejahteraan masyarakat.

Kelompok-kelompok masyarakat setempat yang menolak pendirian pabrik semen, memiliki nalar dan kepentingan yang berlawanan dengan pihak perusahaan dan juga pemda. Batu kapur yang terhampar di pegunungan harus dibiarkan sebagaimana adanya karena di bawahnya terkandung simpanan cadangan air yang amat bernilai. Cadangan air tersebut adalah sumber air untuk kebutuhan pertanian dan keperluan hidup sehari-hari. Terutama bagi masyarakat Samin yang sangat mengandalkan bekerja di sektor pertanian sebagai mata pencaharian pokok, air adalah segala-galanya. Air adalah sumber kehidupan. Karena itu, penambangan batu kapur untuk keperluan industri semen adalah ancaman kehidupan. Mereka pun menolak dengan lugas dan tegas. Pegunungan Kendeng Utara tidak boleh diusik dan harus dilindungi.

Isu dampak lingkungan

Masing-masing pihak memiliki prakiraan tentang dampak-dampak lingkungan yang bisa ditimbulkan oleh proses pembangunan pabrik, dari tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi hingga pasca-operasi. Kedua pihak memiliki argumen yang sangat bertentangan tentang potensi dampak yang bisa terjadi.

Di satu pihak, bagi PT SMS dan pemda, dampak lingkungan adalah akibat yang tidak

bisa dihindari dari kegiatan industrial seperti pabrik semen. Resiko adalah akibat inheren yang harus dihadapi. Dampak dan resiko lingkungan bisa dikelola dengan menggunakan piranti-piranti teknologi dan manajemen sosial. PT SMS dan pemda selalu mendasarkan pada argumen ilmiah melalui dokumen Amdal. Amdal adalah kajian yang akan membantu untuk mengidentifikasi dampak-dampak penting terkait dengan aspek geo-fisik, biologi, sosial ekonomi budaya, dan kesehatan masyarakat, yang mungkin akan terjadi, dan selanjutnya dikelola oleh pihak perusahaan dan pihak-pihak terkait lainnya. Karena itu, masyarakat biasanya selalu diminta untuk menunggu hasil studi Amdal, dan bahkan diminta terlibat dalam studi tersebut, untuk mengidentifikasi dampak-dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Bagi pihak pemerintah daerah, hasil studi Amdal merupakan bahan pertimbangan ilmiah untuk mengambil keputusan diterbitkannya izin lingkungan. Karena itu, semua keputusan yang terkait dengan dampak lingkungan harus merujuk pada hasil kajian Amdal.

Bagi kelompok-kelompok masyarakat yang menolak pabrik semen, tampaknya tidak bisa secara mudah menerima nalar ilmiah Amdal yang dirujuk oleh perusahaan dan pemda. Mereka agaknya memiliki nalar dan pengetahuan sendiri untuk mengidentifikasi dan memprakirakan dampak-dampak lingkungan dari proses pembangunan pabrik semen. Bentuk-bentuk dampak lingkungan yang dibangun dari nalar dan pengetahuan serta tradisi-tradisi masyarakat setempat biasanya disebut sebagai '*perceived impact*'. Bentuk dampak lingkungan ini tumbuh seiring dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat terkait kondisi alam di sekitar mereka yang diwariskan secara turun temurun. Jadi berbeda dengan perusahaan dan pemda yang menggunakan perangkat ilmiah seperti Amdal, warga masyarakat

mengkonstruksi prakiraan dampak lingkungan yang mungkin akan terjadi melalui mekanisme *'perceived impact'*.

Dampak lingkungan yang diprakirakan masyarakat adalah tanah longsor dan banjir. Pembangunan pabrik semen akan mengeruk batu kapur sebagai bahan baku, sehingga dapat memicu terjadinya longsor karena kondisi tanah menjadi rentan. Pengambilan bahan baku dari pegunungan juga akan memotong semua pohon yang ada sehingga menyebabkan penggundulan hutan. Hutan yang gundul sangat berbahaya jika hujan datang dengan intensitas yang tinggi. Dengan hilangnya pohon-pohon yang sebelumnya berfungsi sebagai penahan dan penyimpan air, maka air akan mengalir langsung ke pemukiman masyarakat yang ada di dataran dan lembah. Hal ini dapat memicu terjadinya longsor dan banjir bandang. Air hujan akan mengangkut seluruh material yang berada di atas pegunungan (PSLH UGM, 2011: 105-106).

Rencana pendirian pabrik semen ini, bagi mereka yang menolaknya, ibarat lonceng kematian bagi wilayah yang subur ini. Tokoh Sedulur Sikep, Gunretno, menguatkan prakiraan dua warga tersebut: "Bayangkan, hanya karena hutan gundul saja banyak bencana, apalagi kalau pegunungan Kendeng ditambang. Bagaimana parahnya nanti" (*Kompas*, 4 Mei 2012).

Disamping menyebabkan kerusakan dan bahkan hilangnya sumber mata air, pengambilan batu kapur sebagai bahan baku pabrik semen dinilai oleh kelompok masyarakat setempat yang menolak, akan menyebabkan sejumlah kerusakan lingkungan hidup lainnya. Dengan rusaknya mata air, lahan pertanian diduga akan mengalami kekurangan pasokan air atau kekeringan, yang berakibat pada penurunan produksi pertanian khususnya padi. Seorang informan mengungkapkan

kekhawatirannya melalui pertanyaan retorik: "Sumber air yang tidak *'dislameti'* (didoakan melalui ritual tertentu) saja bisa memunculkan *pageblug* (wabah penyakit), bagaimana kalau sumber air tersebut hilang atau tercemar?" (Peserta FGD di desa Durensawit, Januari 2011) (PSLH UGM, 2011: 107).

Operasi pabrik semen juga dinilai warga dapat memunculkan polusi udara, air, dan suara yang berpengaruh pada berkurangnya derajat kesehatan masyarakat. Dengan melihat pengalaman masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik-pabrik semen, polusi udara dapat ditimbulkan oleh asap yang dikeluarkan mesin-mesin pabrik semen. Asap pabrik semen dapat menyebabkan mata perih dan gangguan pernapasan bagi masyarakat sekitar yang terpapar. Sedangkan polusi air dapat berasal dari limbah cair yang dikeluarkan oleh pabrik. Limbah cair ini biasanya dialirkan ke sungai dan bisa merembes ke sumur-sumur penduduk, dan dapat menyebabkan gejala sakit bagi warga yang memakai air yang telah tercemar. Dampak terkait lainnya berbentuk kebisingan yang berasal dari mesin-mesin pabrik semen. Warga membayangkan mesin-mesin pabrik yang beroperasi sampai larut malam sehingga dapat mengganggu ketenteraman masyarakat. Kebisingan ini juga dapat disebabkan oleh mobil-mobil atau truk pengangkut bahan baku yang melintasi pemukiman masyarakat.

Penambangan batu kapur dan dampak ikutannya juga diduga dapat menyebabkan musnahnya flora dan fauna langka yang berada di Pegunungan Kendeng, seperti merak hijau, harimau jawa, kera, dan biofarmaka (tanaman obat). Keberadaan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat seperti jahe, temulawak, temuireng, cukup banyak berada di kawasan pegunungan tersebut dan selama ini menjadi bahan obat-obatan bagi penduduk. Bahkan ada sejumlah

warga yang telah mampu bekerja sama dengan industri obat tradisional untuk menyuplai bahan bakunya. Selain tanaman obat, terdapat pula “pohon-pohon desa” yang banyak terdapat di area pegunungan dan dilindungi oleh warga dengan cara dikeramatkan. Aktivitas penambangan dikhawatirkan akan menghilangkan keberadaan pohon-pohon tersebut.

Kelompok masyarakat setempat yang menolak pabrik semen juga mengkhawatirkan kondisi sumber daya alam pasca-operasi penambangan. Area lahan bekas penambangan diperkirakan tidak bisa ditanami lagi. Kondisi ini dianggap merugikan anak cucu mereka yang harus menanggung kerusakan alam yang ditimbulkan oleh penambangan (PSLH UGM, 2011: 107-110).

Berdasarkan pada faktor-faktor utama yang memunculkannya, dua isu tersebut dapat dilihat sebagai isu berbasis nilai (*values-based issue*) dan isu berbasis kepentingan (*interest-based issue*) (Wehr, 1979). Bagi pihak perusahaan dan pemda, isu yang diklaim lebih merupakan isu berbasis kepentingan, yakni bahwa potensi SDA yang melimpah seharusnya didayagunakan untuk tujuan kemajuan ekonomi. Sementara klaim kelompok-kelompok masyarakat yang menolak, lebih mengedepankan isu berbasis nilai, yakni bahwa potensi batuan kapur dan cadangan air di bawahnya adalah sumber kehidupan yang telah secara turun temurun mereka nikmati dan tidak boleh diusik kelestariannya.

Dinamika Konflik

Bagian ini memaparkan dinamika konflik rencana pembangunan pabrik semen dalam rentang waktu tahun 2010 hingga akhir 2012. Perkembangan konflik mengalami pasang surut sejalan dengan tindakan masing-masing pihak yang berkonflik. Suatu peristiwa atau kejadian tertentu bisa diikuti oleh peningkatan

intensitas konflik. Secara umum perkembangan konflik ini bisa dipilahkan ke dalam dua episode. Episode pertama bermula dari sosialisasi oleh PT SMS pada awal tahun 2010 hingga persiapan penyusunan dokumen Amdal pada awal 2011. Sedangkan episode kedua mencakup rentang waktu dari awal 2011 hingga akhir 2012 yang berbarengan dengan proses kajian Amdal yang problematik dan berlarut-larut.

Episode Pertama (2010-awal 2011)

Setelah mendapatkan dukungan dari pihak Pemda Pati, sepanjang tahun 2010, PT SMS telah melakukan beberapa pendekatan kepada warga masyarakat, khususnya di desa-desa yang akan menjadi tapak pabrik semen. PT SMS tampak berupaya untuk tidak mengulangi kegagalan PT Semen Gresik dalam mendirikan pabrik semen di Kecamatan Sukolilo. Pendekatan ke masyarakat dianggap kunci untuk menuju keberhasilan tersebut. Perwakilan perusahaan berupaya mendekati tokoh-tokoh kunci baik tokoh formal (para petinggi desa dan pamong desa) maupun tokoh informal (tokoh masyarakat) dari desa-desa yang masuk dalam rencana tapak pabrik, antara lain Desa Tambakromo, Mojomulyo, Karangawen dan Larangan, yang semuanya berada dalam wilayah Kecamatan Tambakromo. Terhadap warga masyarakat dilakukan sosialisasi tentang rencana kegiatan pembangunan pabrik semen, lengkap dengan manfaat-manfaat yang akan dihasilkannya.

Secara khusus, perusahaan juga mengajak para pemilik lahan yang masuk dalam tapak pabrik supaya tidak melepas/menjual tanahnya ke tangan para spekulasi tanah, yang kemungkinan akan masuk ke desa-desa tersebut. Para spekulasi tanah biasanya mendekati warga untuk membeli tanah di area yang direncanakan akan dibangun pabrik dan fasilitas

pendukungnya. Dengan pendekatan seperti ini, PT SMS berharap rencana pembangunan pabrik semen terealisasi, maka keuntungan atas kegiatan pembebasan/pembelian tanah akan didapatkan langsung oleh pemiliknya secara signifikan dan keuntungan tidak jatuh pada spekulan tanah (PSLH UGM, 2011: 84).

Bahkan PT SMS juga pernah mengajak perwakilan warga dari desa-desa yang masuk dalam area tapak pabrik untuk berkunjung ke pabrik semen PT Indocement di Bogor, Jawa Barat. Kunjungan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara langsung dan utuh tentang sistem produksi yang dilakukan dan dampak yang muncul akibat proses produksi di sekitar pabrik, khususnya tentang ada-tidaknya pencemaran udara yang diakibatkan baik oleh cerobong asap pabrik maupun debu yang ditimbulkan akibat aktivitas pabrik. Warga yang berkunjung diharapkan akan menyebarkan informasi tersebut kepada tetangga atau kerabat yang ada di desa mereka, dan karenanya bisa memupus berbagai bentuk kekhawatiran tentang dampak dari proses industrial pabrik semen (PSLH UGM, 2011: 85).

Namun demikian, harapan pihak perusahaan tidak sepenuhnya terwujud dan bahkan mendapatkan tanggapan yang sebaliknya. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan PT SMS ternyata hanya melibatkan para tokoh desa dan pemilik lahan yang akan dijadikan tapak pabrik. Hal ini memunculkan anggapan di kalangan warga yang tidak diikutkan dalam sosialisasi bahwa warga yang diundang mendapatkan perlakuan yang istimewa dari perusahaan dan mereka yang tidak diundang tidak mendapatkan apa-apa. Pendekatan khusus oleh perusahaan terhadap pemilik tanah di area rencana tapak pabrik juga memicu munculnya kecemburuan sosial, bahwa pemilik lahan

yang berada di luar tapak pabrik tidak akan memperoleh ganti-rugi seperti yang akan diperoleh oleh para pemilik tanah di tapak pabrik.

Selanjutnya, warga masyarakat yang ikut kunjungan ke pabrik semen PT Indocement ternyata tidak mampu memerankan diri sebagai agen yang menjelaskan tentang kondisi pabrik semen tersebut kepada warga lain yang tidak ikut acara kunjungan. Bahkan warga masyarakat, terutama yang kontra pabrik semen, menganggap bahwa warga ikut kunjungan adalah warga yang pro pabrik semen dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang dekat atau kerabat para petinggi desa. Selama kunjungan mereka mendapat perlakuan yang istimewa karena memperoleh uang saku yang lumayan banyak untuk ukuran orang desa. Hal ini menambah kecemburuan sosial antara warga yang ikut dan yang tidak ikut kunjungan (PSLH UGM, 2011: 86).

Berbagai bentuk kegiatan sosialisasi oleh PT SMS kepada masyarakat tentang rencana pendirian pabrik semen, segera menyulut reaksi resisten dari warga dan kelompok-kelompok masyarakat yang pernah terlibat dalam aksi-aksi penentangan terhadap rencana pendirian pabrik semen di Kecamatan Sukolilo oleh PT Semen Gresik pada rentang waktu tahun 2008-2009. Mereka yang tergabung dalam JMPPK pun bergerak kembali melakukan aksi-aksi penolakan pabrik semen. Cerita sukses mereka dalam menggagalkan pendirian pabrik semen di Sukolilo oleh PT Semen Gresik tahun 2009 hendak diulang kembali untuk menggagalkan rencana pendirian pabrik semen di Tambakromo dan Kayen oleh PT SMS.

Gamurang yang merupakan anggota JMPPK di Desa Tambakromo menunjukkan aksi-aksi penolakan pabrik semen secara berani dan terbuka. Untuk mengajak warga masyarakat menolak pabrik semen,

Gamurang memasang baliho dan spanduk dengan kalimat-kalimat yang menentang kehadiran pabrik semen di Tambakromo dan Kayen yang dipasang di pinggir jalan raya Pati – Kayen.

Gambar 1.
Spanduk penolakan pabrik semen yang dibuat Gamurang dan dipasang di pinggir jalan



Sumber: PSLH UGM, 2011, hal 87.

Selain itu Gamurang juga melakukan aksi penolakan dengan menggelar acara ritual adat setempat yang disebut sedekah bumi. Ritual adat ini sebenarnya acara rutin tahunan yang diselenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan. Namun dalam konteks ini, Gamurang mempergunakan momentum tersebut untuk mengungkapkan pesan dan aksi mempertahankan kondisi alam pegunungan Kendeng Utara dan sekitarnya dari segala aktivitas yang bisa menyebabkan kerusakan sumber daya alam pegunungan tersebut (PSLH UGM: 2011: 87).

Kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam JMPPK secara aktif melakukan komunikasi dengan para warga baik di desa-desa yang menyatakan mendukung maupun yang menolak pabrik semen. Tindakan ini didasari alasan bahwa tidak semua warga masyarakat mengetahui permasalahan secara detail terkait dengan rencana pembangunan pabrik semen.

Tindakan ini bisa dipahami sebagai aksi tandingan terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh PT SMS. Dengan cara ini, JMPPK berharap warga menerima dan memiliki informasi dan pengetahuan yang seimbang dan tidak sepotong-potong sehingga pada akhirnya nanti bisa memberikan penilaian atas layak dan tidaknya pabrik semen didirikan di wilayahnya.

Dalam aksi menentang pabrik semen, JMPPK menggunakan berbagai media komunikasi modern. Untuk mengajak warga menolak pabrik semen, mereka menyebarkan dan menempelkan stiker berisi penolakan pabrik semen di rumah-rumah penduduk.

Gambar 2.
Stiker penolakan pabrik semen yang dipasang di rumah-rumah



Sumber: PSLH UGM, 2011, hal 87.

Selain itu, JMPPK telah memproduksi film dokumenter berjudul 'Selamatkan Kendeng' yang pernah diunggah ke *youtube* pada bulan Oktober 2011. Film ini pernah dijadikan media kampanye penolakan pada saat mereka menolak pembangunan pabrik semen PT Semen Gresik di Sukolilo. Film ini menggambarkan penolakan warga, penyesalan warga Tuban yang lahannya dimakan pabrik semen, sampai kehadiran

mantan Menteri Lingkungan Hidup Sonny Keraf yang mengingatkan ia pernah menolak investasi itu (*Kompas*, 4 Mei 2012).

Episode Kedua (awal 2011- akhir 2012)

Pada bulan Mei 2011, proses pembangunan pabrik semen memasuki fase sosialisasi penyusunan Amdal. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pati memfasilitasi kegiatan ini. Meski telah mengirimkan undangan acara sosialisasi pada Kamis 19 Mei 2011, tanpa pemberitahuan yang jelas, BLH menunda acara tersebut. Warga yang diundang pun mengungkapkan kekecewaan dan protes. Warga yang bersikap menolak pabrik semen menuduh BLH melakukan tindakan kebohongan publik. Kepala desa Tambakromo menyatakan bahwa warga tidak menyukai tim survei yang masuk lokasi secara diam-diam atau hanya sepengetahuan perangkat desa. Dua bulan sebelumnya memang terjadi insiden pengusiran terhadap lima orang anggota tim penyusun Amdal yang sedang mewawancarai warga Desa Karangawen. Sebagian besar warga yang mengusir mengenakan atribut penolakan pabrik semen (*Suara Muria*, 27 Maret 2011). Sambil mengklaim bahwa hampir seluruh masyarakat di tiga kecamatan menolak pabrik semen, seorang tokoh JMPPK menghimbau pemerintah untuk tidak memaksakan kehendak dan lebih mendukung masyarakat kecil terutama petani dan melestarikan alam dan pangan (*Kompas*, 21 Mei 2011).

Akhirnya acara sosialisasi Amdal digelar pada Sabtu 21 Mei 2011 di Kecamatan Tambakromo. Tim konsultan Amdal dari PT Mitra Adi Pranata, yang disertai oleh jajaran direksi PT SMS dan BLH Pati menyosialisasikan kegiatan Amdal dengan pengawasan ketat dari aparat kepolisian. Sekitar tiga ratus warga yang menolak pabrik semen pun berupaya masuk ke

ruang acara sosialisasi sembari meneriakan "tolak pabrik semen, lestarikan pegunungan Kendeng". Seorang tokoh masyarakat Desa Brati menegaskan alasan penolakannya: "Kami tidak ingin pabrik semen berdiri di pegunungan Kendeng Utara. Mata air bisa mati, tanaman pertanian terkena debu, dan warga yang tidak punya kemampuan bakal menganggur." Merespon penolakan warga ini, Kepala BLH Kabupaten Pati meminta warga memberi kesempatan kepada tim penyusun Amdal untuk bekerja. Menurutnya, "penolakan harus dilakukan dengan dasar kajian ilmiah" (*Kompas*, 22 Mei 2011). Meskipun mendapatkan penentangan dari kelompok-kelompok warga masyarakat, yang mempersulit proses pengumpulan data, tim penyusun Amdal tampaknya terus melanjutkan kajian.

Dalam kaitan dengan jejaring aksi penolakan pabrik semen, peran JMPPK sangat sentral. Melalui pendirian 'Omah Kendeng' di Desa Sukolilo, sejak pertengahan 2010, JMPPK terus menggalang dukungan masyarakat dan memperkuat kapasitas organisasi mereka. Rumah ini dirancang sebagai ruang belajar masyarakat dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan. Pada awal 2011, agar rumah tersebut dapat leluasa bersuara dan diakses masyarakat luas, bersama dengan Desantara Foundation, JMPPK melengkapinya dengan membangun situs di dunia maya (www.omahkendeng.org). Omah Kendeng menjadi situs yang memuat beragam berita, informasi, dan peraturan terkait penambangan di kawasan karst. Untuk memperluas dukungan publik, perjuangan warga menolak pabrik semen didokumentasikan, diwadahi dan disuarakan kembali melalui situs Omah Kendeng. Pengunjung situs rata-rata 1.500 orang per bulan. Situs tersebut masih didukung oleh dua bentuk jejaring sosial yakni *Facebook* dan *Twitter*.

Untuk menarik perhatian anak-anak dan remaja, situs Omah Kendeng memuat komik 'Petualangan Apong dan Kopong'. Komik berkisah tentang dua sahabat muda bernama Apong dan Kopong dalam menyelamatkan pegunungan Kendeng Utara bersama masyarakat sekitar. Komik tersebut memuat informasi dan pendidikan lingkungan hidup kepada warga dengan bahasa yang sederhana (Kompas, 5 September 2012).

Gambar 3.
Contoh penggalan dialog dalam komik "Petualangan Apong dan Kopong, Seri 6"



Sumber: <http://omahkendeng.org/komik-kendeng-edisi-3/>, diunduh pada 28 Maret 2013.

Memasuki tahun 2012, aksi penentangan pabrik semen kembali terjadi dengan memanfaatkan momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus 2012. Sekitar tiga ratus warga

Desa Keben Kecamatan Tambakromo yang menamakan diri Aliansi Pemuda Peduli Lingkungan (Appel) dan Lingkar Kendeng Sejahtera (Likra) melakukan unjuk rasa dengan memblokir jalan sambil membentangkan berbagai spanduk penolakan pabrik semen dan kemudian diikuti aksi menancapkan ratusan bambu runcing bercat merah putih di sepanjang jalan yang menuju rencana lokasi tapak pabrik semen. Bambu runcing dipilih sebagai simbol perlawanan karena perusahaan semen berperilaku mirip dengan penjajah. Koordinator aksi menyatakan, "Kami tidak ingin terjajah lagi dengan perusakan lingkungan yang mengakibatkan kehidupan kami terancam. Karena itu, tidak akan mundur sedikit pun dan akan tetap menolak pabrik semen yang kami anggap sebagai penjajah," (Suara Muria, 24 Agustus 2012). Bambu runcing yang ditancapkan tersebut dipasangi papan-papan kayu bertuliskan "Selamatkan Bumi Kendeng dari Investor Semen", "Air dan Tanah milik rakyat", "Tidak boleh dijual untuk penambangan" (Kompas.com, 17 Agustus 2012).

Gambar 4.
Bambu runcing dengan papan bertuliskan tolak pabrik semen



Sumber: <http://gkendeng.blogspot.com/2012/07/bambu-runcing-dan-semangat-menjaga-alam.html>, diunduh pada 28 Maret 2013.

PT SMS mengatakan bahwa menolak rencana pendirian pabrik semen adalah hak warga, namun menyayangkan penggunaan simbol kekerasan seperti bambu runcing. Perusahaan ini juga mengungkapkan tak akan menggunakan cara kekerasan dalam berinvestasi. Warga dihimbau untuk menunggu hasil kajian Amdal yang masih digodok oleh tim penyusun PT Mitra Adi Pranata (*Kompas*, 24 Agustus 2012).

Unjuk rasa warga yang menolak pabrik semen kembali terjadi pada saat pelantikan Haryanto yang terpilih sebagai Bupati Pati pada tanggal 5 September 2012. Warga mendatangi kantor Bupati Pati dengan tiga puluh truk, mobil, dan kendaraan lain. Untuk kesekian kalinya mereka menyuarakan penolakan pabrik semen sembari menuntut bupati baru untuk mencabut ijin lokasi pendirian pabrik semen yang telah diberikan kepada PT SMS pada tanggal 18 Mei 2011. Mereka merasa tidak dimintai persetujuan dan tidak menyetujui rencana pendirian pabrik semen. Sang bupati menanggapi tuntutan tersebut dengan menyatakan akan membicarakan persoalan tersebut dengan instansi pemerintah terkait sebelum diambil keputusan (*Kompas*, 6 September 2012).

Meskipun tidak secara eksplisit mendukung warga dan jaringan organisasi yang menolak pabrik semen, hasil kunjungan dan pengecekan lapangan oleh Komisi Mediasi Konflik dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Dewan Kehutanan Nasional, pada awal Oktober 2012, menegaskan pentingnya pelestarian kawasan pegunungan Kendeng Utara. Komisi tersebut meminta Kementerian Kehutanan untuk berhati-hati dalam mengeluarkan izin eksploitasi. Pegunungan Kendeng Utara yang merupakan lahan hutan Perhutani atau hutan rakyat sangat dibutuhkan masyarakat. Disamping didayagunakan untuk berbagai jenis tanaman pangan, kawasan tersebut juga

merupakan area konservasi yang harus dilindungi terutama sumber air. Jangan sampai industri semen merusak kelestarian alam dan kehidupan masyarakat tradisional yang sudah lama bergantung pada pegunungan tersebut (*Kompas*, 8 Oktober 2012).

Hingga menjelang akhir 2012, tim konsultan penyusun Amdal belum mampu merampungkan seluruh dokumen. Proses penyusunan Amdal terganjal ketidaklengkapan data karena kesulitan mencari data dan masuk ke lokasi calon tapak pabrik dan bahan baku semen. Menurut ketua tim penyusun Amdal, warga menutup diri dan selalu menghalangi tim ke lokasi (*Kompas*, 8 Oktober 2012). Akibatnya, tim belum mampu menyelesaikan kajian Amdal yang telah dimulai sejak awal 2011.

Dampak konflik

Selama kurang lebih tiga tahun, konflik sosial tentang penambangan versus pelestarian karst ini telah berjalan. Dampak tentu dialami oleh masing-masing pihak yang berkonflik. Dari pihak perusahaan, aksi-aksi penentangan oleh kelompok-kelompok masyarakat setempat secara jelas telah mengganggu tahapan-tahapan proses penambangan karst menjadi semen. Dalam waktu tiga tahun, perusahaan belum bisa melampaui fase perencanaan atau pra-konstruksi. Kegiatan sosialisasi rencana kegiatan proyek pembangunan pabrik semen memang telah berjalan, meski dengan hasil yang tidak sesuai diharap karena aksi penolakan warga yang kuat dan kontinu. Perusahaan mengalami kesulitan yang serius dalam proses penyusunan kajian Amdal yang telah memakan waktu dua tahun, dari normalnya sekitar 6-12 bulan. Tentu saja hal ini berimplikasi pada perubahan tahapan-tahapan proses pembangunan pabrik semen yang telah didesain oleh perusahaan. Meskipun demikian, PT SMS tampak terus berupaya

melanjutkan rencana pembangunan pabrik semen meski tertahan oleh penyusunan Amdal yang berlarut-larut.

Pihak pemda Kabupaten Pati tampak tidak terpengaruh oleh tuntutan penolakan dari warga dan kelompok-kelompok anti pabrik semen. Bahkan sebaliknya pemda terus memberikan dukungan kepada PT SMS. Pemda Kabupaten Pati telah menerbitkan izin lokasi, bahkan bersama DPRD telah melakukan perubahan RTRW Kabupaten Pati yang memungkinkan wilayah Pati bagian selatan diperuntukan sebagai kawasan industri.

Di pihak lain, masyarakat di desa-desa sekitar lokasi rencana pendirian pabrik dan penambangan batu kapur untuk bahan baku semen, mengalami kerugian sosial yang berarti. Masyarakat terbelah antara kelompok yang pro dan kontra pembangunan pabrik semen. Sampai level tertentu, keterbelahan sosial ini bisa mengancam harmoni sosial yang telah terbangun dalam masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Kepala desa Tambakromo, "Tak jarang terjadi konflik antara masyarakat yang pro dan kontra, meski skalanya masih dalam lingkup tetangga atau keluarga. Masyarakat juga mudah curiga terhadap orang asing yang masuk desa" (*Kompas*, 21 Mei 2011). Dalam jangka panjang, kondisi sosial ini tentu saja akan menggerus kerukunan, persaudaran, dan bentuk-bentuk harmoni sosial lainnya dalam masyarakat.

Kesimpulan

Hingga akhir 2012, belum ada indikasi yang menunjukkan pihak-pihak yang berkonflik mengendurkan tuntutan kepentingan masing-masing. PT SMS masih terus berupaya mewujudkan rencana pembangunan pabrik semen. Meski terganjal, PT SMS melalui tim penyusun Amdal yang ditunjuknya terus berupaya merampungkan dokumen kajian. PT SMS

sangat menunggu hasil kajian Amdal karena keputusan kelanjutan rencana proyek pendirian pabrik semen ini harus merujuk kepada hasil tersebut. Tentu saja perusahaan berharap, hasil kajian Amdal berakhir dengan status kelayakan lingkungan hidup yang membuka peluang bagi Bupati Pati untuk menerbitkan surat izin lingkungan bagi PT SMS. Jika hal ini terjadi maka perusahaan bisa meneruskan proses pendirian pabrik semen.

Bagi pemda terutama bupati, hasil kajian Amdal akan menjadi rujukan untuk menerbitkan izin lingkungan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan, dalam proses penerbitan izin lingkungan, bupati harus mengumumkan ke publik/ masyarakat tentang adanya permohonan izin dari perusahaan dan kemudian memperhatikan saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat, tentunya termasuk warga yang menolaknya. Pada titik ini bupati berada di persimpangan kepentingan dua pihak yang bertikai. Apabila bupati menerbitkan izin lingkungan bagi PT SMS, maka hal itu bisa diartikan bahwa ia lebih berpihak kepada kepentingan perusahaan. Sementara jika bupati menolak untuk menerbitkan izin lingkungan, maka ia lebih condong kepada kepentingan kelompok-kelompok masyarakat yang menolak pabrik semen. Belajar dari pengalaman banyak kasus konflik pemanfaatan SDA, pada akhirnya, kajian Amdal bisa diselesaikan (meskipun memakan waktu lama) dan diikuti oleh penerbitan izin lingkungan. Jika skenario ini yang terjadi maka bisa dipastikan bahwa konflik akan terus berlanjut karena kelompok-kelompok masyarakat anti pabrik semen akan terus melawan. Terlebih lagi, kelompok-kelompok ini sebelumnya pernah berhasil menggagalkan rencana pendirian pabrik semen oleh PT Semen Gresik di Kecamatan Sukolilo.

Sementara itu, kelompok-kelompok dan jejaring penentang pabrik semen tidak surut dengan posisi dan kepentingan dasarnya, yakni menolak pabrik semen. Bagi mereka satu-satunya pilihan resolusi adalah pembatalan rencana pendirian pabrik semen. Mereka telah menunjukkannya dengan menuntut bupati untuk mencabut izin lokasi yang telah diberikan kepada PT SMS, dan mengganggu proses penyusunan Amdal dengan menghambat akses tim penyusun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Mereka menentang upaya penyusunan dokumen Amdal dan menuntut PT SMS menghentikan rencana pembangunan pabrik semen. Bagi mereka, hasil kajian Amdal tidak lebih dari justifikasi untuk kelanjutan rencana pembangunan pabrik semen.

Memperhatikan posisi dan isu kepentingan pihak-pihak yang berkonflik tersebut, upaya pencarian resolusi konflik ini sangat berkelok dan rumit. Kepentingan kedua belah pihak yang sangat diametral agaknya sulit dipertemukan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bisa jadi merupakan pihak yang bisa berdiri sebagai mediator dari kedua belah pihak yang berkonflik. Namun netralitas dari pemerintah provinsi dalam resolusi konflik ini tidak mudah untuk didapatkan. Ini terutama karena pada kasus konflik rencana pabrik semen di Sukolilo oleh PT Semen Gresik tahun 2008-2009, pihak pemerintah provinsi pada masa pemerintahan Gubernur Bibit Waluyo justru menjadi bagian dari pihak yang berkonflik. Pada titik ini terpilihnya Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah pada pemilihan gubernur tahun 2013 menerbitkan harapan baru terhadap peluang penyelesaian konflik berbasis sumber daya karst ini. Namun demikian, tulisan ini membutuhkan riset lanjutan untuk menemukan peluang penyelesaian konflik tersebut pada era pemerintahan gubernur yang baru.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel

Hirsch, Philip., and Warren, Carol (Eds.)/1998. *The Politics of Environment in Southeast Asia, Resources and Resistance*. London: Roulledge.

Kementerian Sekretariat Negara. (2012). Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan.

Prasetyantoko, A. et.al. (Eds)/2012. *Pembangunan Inklusif, Prospek dan Tantangan Indonesia*. Jakarta: LP3ES dan Prakarsa.

PSLH-UGM. (2011). *Respon dan Sikap Masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah*. Laporan penelitian tidak diterbitkan.

Suharko. (2004). "Negara, Pelaku Bisnis dan Masyarakat Sipil: Studi Kasus Konflik Inti Indorayon Utama", chapter buku dalam Lambang Trijono et.al. (Eds), *Potret Retak Nusantara, Studi Kasus Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: CSPA (PSKP) UGM books

Wehr, Paul. (1979). *Conflict Regulation*. Boulder, Colorado: Westview Press.

Sumber Media Massa dan Media Sosial

Kompas. 21 Mei, 2011. Warga Jangan Didesak; Pabrik Semen Dikhawatirkan Rusak Lingkungan, hlm. 22.

Kompas. 22 Mei, 2011. Warga Waspada Amdal; Investor Siap Mundur jika Pabrik Semen Tidak Layak Bangun, hlm. 3.

Kompas. 21 Oktober, 2011. Bibit Waluyo Kecewa; Suyitno: Petambang Liar Tidak Pernah Ditindak, hlm. 23.

Kompas. 4 Mei, 2012. Sedulur Sikep Merawat Bumi, hlm. 1 & 15.



Mohon dicatat sebagai pelanggan JSP

Nama:

Alamat:

Kode Pos: Telepon/HP: email:

Harap dikirim Eksemplar JSP mulai volume nomor tahun

Dengan ini saya kirimkan uang sebesar Rp. melalui:

- Bank Mandiri, KC Gedung Magister Yogyakarta, rekening nomor 137-0007162445 a.n. Arie Ruhyanto cq Jurnal Fisipol
- Pos wesel dengan resi nomor tanggal

Harga:

- Harga langganan (3 edisi) untuk satu tahun termasuk ongkos kirim sebesar Rp. 125.000,- (kilat khusus) untuk seluruh wilayah di Indonesia
- Harga satu edisi JSP Rp. 50.000,- (kilat khusus) untuk seluruh wilayah di Indonesia

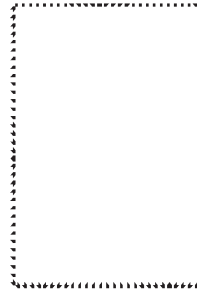
.....,201...

(.....)

FORMULIR INI BOLEH DIFOTOKOPI

-----gunting dan kirimkan ke alamat Redaksi JSP atau fax ke (0274) 563362-----

**PERMINTAAN
LANGGANAN**



Kepada: Redaksi Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio-Yustisia, Bulaksumur
Yogyakarta 55281